



Kode Etik Jaksa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Kejaksaan di Era Digital

Rizka Amelia¹⁾, Puti Priyana²⁾

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

rizkamelia1439@gmail.com¹⁾

puti.priyana@fh.unsika.ac.id²⁾

Abstrak

Perubahan signifikan terjadi dalam berbagai bidang kehidupan akibat era digital, termasuk dalam konteks penegakan hukum. Era digital membuka peluang baru bagi Kejaksaan untuk meningkatkan kepercayaan publik. Kode etik jaksa berfungsi sebagai panduan bagi mereka dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran kode etik jaksa dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan di era digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kode etik jaksa memiliki peran krusial dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan di era digital. Kode etik jaksa membantu jaksa untuk bersikap profesional dan berintegritas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan. Oleh karena itu, Kejaksaan perlu meningkatkan penegakan kode etik jaksa secara tegas dan konsisten. Selain itu, Kejaksaan juga perlu melakukan sosialisasi kode etik jaksa kepada masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan juga menjadi langkah penting untuk memperkuat kepercayaan publik.

Katakunci : Kejaksaan, kepercayaan publik, kode etik jaksa, era digital

Abstract

Significant changes occur in various fields of life due to the digital era, including in the context of law enforcement. The digital era opens up new opportunities for the AGO to increase public trust. One of the steps that the AGO can take to strengthen public trust is the implementation of a code of ethics for prosecutors. The prosecutor's code of ethics serves as a guide for them in carrying out their duties and responsibilities. This study aims to Evaluate the role of the prosecutor's code of ethics in increasing public trust in the Prosecutor's Office in the digital era. The research method used is normative juridical with a statutory approach. The results showed that the prosecutor's code of ethics has a crucial role in increasing public trust in the Public Prosecutor's Office in the digital era. The prosecutor's code of ethics helps prosecutors to behave professionally and with integrity, which in turn can increase public trust in the Prosecutor's Office. Therefore, the AGO needs to increase the enforcement of the prosecutor's code of ethics firmly and consistently. In addition, the AGO also needs to socialize the prosecutor's code of ethics to the public. Increasing transparency and accountability in the implementation of the duties and functions of the Prosecutor's Office is also an important step to strengthen public trust.

Keywords: Prosecutor's Office, public trust, prosecutor's code of ethics, digital era



PENDAHULUAN

Etika adalah pandangan mengenai kebaikan atau keburukan tindakan atau perilaku seseorang, sementara moral merujuk pada perbuatan baik atau buruk seseorang. Etika mencakup ide-ide dan aspirasi terkait dengan kebaikan tindakan atau perilaku manusia. Etika selalu mengilustrasikan contoh-contoh yang baik, sedangkan moral berfokus pada penilaian terhadap pelaksanaan contoh-contoh yang diberikan oleh etika. Oleh karena itu, individu yang memiliki etika dianggap sebagai orang yang memberikan teladan perilaku yang baik, sedangkan individu yang bermoral adalah orang yang menerapkan teladan tersebut dalam tindakan mereka.¹ Salah satu aspek yang ditekankan oleh etika dan moral dalam hal perilaku individu terkait dengan bidang pekerjaan khusus yang disebut sebagai profesi. Profesi didefinisikan sebagai bentuk pekerjaan yang melibatkan pengetahuan teoritis dan keterampilan teknis, yang bergantung pada integritas dan kejujuran. Karena profesi melibatkan pelayanan kepada orang lain, ketergantungan dan harapan yang tinggi dari pihak yang membutuhkan bantuan menjadi sangat signifikan dalam menerapkan prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena itu, para praktisi profesi diharapkan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam menjalankan tugas dan fungsi profesinya agar dapat bekerja secara profesional di bidangnya.

Profesi yang bergerak di sektor hukum yang umumnya dikenal dan populer di era digital mencakup hakim, jaksa, advokat, notaris, dan berbagai instansi lain yang memiliki kewenangan sesuai dengan undang-undang. Para praktisi hukum yang bersifat profesional menjabat sebagai pejabat umum di bidangnya masing-masing. Oleh karena itu, tugas utama mereka adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi keprofesionalannya, para profesional hukum dilengkapi dengan panduan-panduan yang mencakup aspek hukum secara umum (perundangan) dan panduan etik serta moral profesi (kode etik profesi). Dengan demikian, tanggung jawab profesi dalam menjalankan tugas melibatkan tanggung jawab hukum dan tanggung jawab moral.²

Salah satu tantangan yang dihadapi oleh para jaksa di era digital adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan gaya hidup yang didominasi oleh teknologi digital. Selain itu, modus operandi kejahatan yang berbasis digital juga menjadi semakin beragam dan umum. Dengan penguasaan yang baik terhadap Teknologi Informasi (TI), diharapkan bahwa dalam penanganan kasus, tidak akan terjadi kegagalan dalam penuntutan akibat kesenjangan pengetahuan jaksa terhadap kemajuan teknologi informasi.

Pada era komunikasi digital saat ini, interaksi dengan publik tidak terbatas pada media konvensional, tetapi juga melibatkan media sosial. Media sosial dijelaskan sebagai konten dan interaksi digital yang dibuat oleh individu dan saling berinteraksi satu sama lain. Dalam konteks media sosial, pesan yang disampaikan dan respons atau umpan balik dari masyarakat dapat dipantau secara instan.

Penggunaan media sosial saat ini oleh lembaga pemerintahan, termasuk Kejaksaan, tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Lebih dari itu, media sosial dijadikan sebagai platform untuk memperkenalkan strategi dan tujuan pembangunan, membina interaksi dengan masyarakat, serta untuk merespons dan menggali pendapat serta aspirasi terkait kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kejaksaan.



METODE

Istilah "metode penelitian" terdiri dari dua kata, yaitu "metode" dan "penelitian". Asal usul kata "metode" berasal dari bahasa Yunani, yakni "*methodos*", yang artinya menuju suatu cara atau jalan. Metode merujuk pada kegiatan ilmiah yang terkait dengan cara sistematis untuk memahami suatu objek kajian atau suatu fenomena dengan tujuan menemukan jawaban yang didukung secara ilmiah dan memiliki validitas.³

Penelitian hukum merupakan suatu proses analitis yang melibatkan penggunaan metode, sistem, dan pemikiran konkret dengan tujuan untuk menyelidiki fenomena hukum tertentu dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang timbul. Oleh karena itu, pemilihan metode penelitian yang sesuai menjadi suatu keharusan. Metode tersebut harus mendukung proses penelitian sesuai dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang hendak dicapai. Hal ini dilakukan untuk mengkaji satu atau beberapa fenomena hukum tertentu melalui analisis. Terdapat tiga indikator yang membimbing penentuan langkah-langkah metode penelitian hukum menurut wilayah hukum dalam dokumen hukum.

Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang melibatkan pemeriksaan bahan pustaka dan sumber sekunder sederhana. Pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan yuridis normatif, yang merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (pendekatan undang-undang). Artikel ini mencakup sejumlah dokumen yang dihimpun dari undang-undang, jurnal, buku, internet, dan sumber lainnya. Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan data sekunder sebagai dasar untuk dianalisis, termasuk mempelajari peraturan perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti, atau yang biasa dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Jaksa memiliki Pengaruh terhadap Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Kejaksaan

Kode etik jaksa memiliki dampak yang sangat berarti pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Kode etik tersebut berperan sebagai pedoman bagi jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Keberadaan kode etik jaksa yang baik dapat membantu jaksa untuk beroperasi dengan tingkat profesionalisme dan integritas yang tinggi, dan ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga kejaksaan. Dalam sebuah survei, tingkat kepercayaan publik terhadap Kejaksaan RI meningkat dan menjadi yang paling tinggi dibandingkan dengan lembaga hukum lain. Kode etik Jaksa juga membantu membangun kepercayaan publik dengan menjadi sahabat yang mendapatkan tempat istimewa di hati masyarakat. Dalam era digital, penggunaan teknologi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyaluran hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Kejaksaan. Oleh karena itu, penerapan Kode Etik Jaksa dalam era digital sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap Lembaga Kejaksaan.

Beberapa pengaruh penting dari kode etik jaksa terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan mencakup:

a. Peningkatan Profesionalisme Jaksa:



Kode etik mengatur standar perilaku untuk jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi mereka. Kode etik yang kuat membantu jaksa untuk berperilaku secara profesional, termasuk menjaga kehormatan profesi, bertanggung jawab sepenuhnya, menjadi teladan bagi masyarakat, dan berkolaborasi dengan rekan jaksa serta pihak penegak hukum lainnya.

b. Peningkatan Integritas Jaksa:

Kode etik juga mengandung larangan-larangan yang bertujuan mencegah pelanggaran etika oleh jaksa. Hal ini mencakup larangan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melarang perilaku tercela, pelanggaran hukum, dan tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan moral.

c. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Kejaksaan:

Kode etik jaksa memuat ketentuan-ketentuan yang menyangkut kewajiban jaksa untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Kode etik yang baik mendorong lembaga kejaksaan untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, termasuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tugas dan fungsi lembaga, hasil kerja, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

Dengan demikian, penting bagi lembaga kejaksaan untuk secara konsisten menerapkan dan menegakkan kode etik jaksa. Sosialisasi kode etik kepada masyarakat juga menjadi langkah penting untuk memastikan pemahaman luas dan mendalam mengenai komitmen jaksa terhadap standar etika yang tinggi.

Peran Kode Etik Jaksa dalam Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Kejaksaan di Era Digital

Peran kode etik jaksa dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan di era digital sangatlah signifikan. Kode etik ini memberikan landasan bagi jaksa untuk bertindak secara profesional, berintegritas, dan transparan dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka. Tindakan untuk meningkatkan tingkat profesionalisme jaksa diakui sebagai usaha yang dihadapkan oleh sejumlah kendala, termasuk masalah independensi, pelanggaran kode etik, dan penurunan kualitas sumber daya manusia. Campur tangan dalam pelaksanaan tugas kejaksaan dapat merugikan independensi, sehingga berpotensi menghambat kemampuan jaksa dalam menangani suatu perkara guna menjaga keberlakuan hukum dalam sistem peradilan.

Dalam konteks era digital, hal ini menjadi lebih penting karena penggunaan teknologi digital memerlukan kepatuhan yang tinggi terhadap etika dan aturan hukum. Dengan menerapkan kode etik ini, lembaga kejaksaan dapat memperoleh kepercayaan masyarakat melalui penegakan hukum yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, kode etik juga membantu memastikan bahwa jaksa tidak terlibat dalam praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, yang dapat merusak kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, peran kode etik jaksa dalam era digital sangat penting untuk memastikan integritas dan kredibilitas lembaga kejaksaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap



lembaga tersebut.

Era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang penegakan hukum. Kemajuan digital memberikan kesempatan baru bagi Kejaksaan untuk memperkuat kepercayaan publik. Salah satu langkah yang dapat diambil oleh Kejaksaan untuk meningkatkan kepercayaan publik adalah menerapkan kode etik jaksa. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya. Kode etik jaksa yang baik dapat membantu jaksa berperilaku secara profesional dan berintegritas, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan, terutama di era digital

Berikut adalah beberapa peran kode etik jaksa dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga Kejaksaan di era digital:

Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:

1. Kode etik jaksa dapat mendukung Kejaksaan untuk menjadi lebih transparan dan akuntabel, aspek yang sangat penting di era digital dengan akses informasi yang lebih luas dari masyarakat.
2. Meningkatkan Responsivitas Terhadap Kebutuhan Masyarakat: Kode etik jaksa membantu Kejaksaan untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang kian tinggi di era digital dengan harapan masyarakat terhadap penegakan hukum
3. Meningkatkan Citra Kejaksaan:
Kode etik jaksa dapat berperan dalam meningkatkan citra Kejaksaan di mata masyarakat, suatu hal yang krusial di era digital di mana citra lembaga sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan publik.

Kode etik jaksa, oleh karena itu, menjadi instrumen krusial dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan di era digital. Upaya konsisten dalam penerapan kode etik, serta sosialisasi yang efektif kepada masyarakat, akan menjadi langkah-langkah penting. Berikut adalah beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan untuk meningkatkan efektivitas penerapan kode etik jaksa dalam membangun kepercayaan publik di era digital:

- a. Melakukan Sosialisasi Massal Kode Etik Jaksa:
Sosialisasi kode etik jaksa dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial, media massa, dan kegiatan langsung dengan masyarakat.
- b. Peningkatan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kode Etik Jaksa:
Pengawasan terhadap pelaksanaan kode etik jaksa perlu ditingkatkan, baik oleh Kejaksaan sendiri maupun oleh lembaga pengawas independen.
- c. Evaluasi Berkala terhadap Pelaksanaan Kode Etik Jaksa

Evaluasi terhadap implementasi kode etik jaksa perlu dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitasnya dalam membangun kepercayaan publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Peran kode etik jaksa sangat signifikan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan di era digital. Kode etik jaksa membantu menciptakan transparansi dan akuntabilitas, responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat, serta peningkatan citra lembaga tersebut di mata publik. Oleh karena



itu, Kejaksaan perlu terus mengupayakan penerapan kode etik jaksa secara konsisten dan tegas. Sosialisasi kode etik jaksa kepada masyarakat juga menjadi langkah penting. Berbagai langkah yang dapat diambil oleh Kejaksaan guna meningkatkan efektivitas kode etik jaksa dalam membangun kepercayaan publik di era digital meliputi:

- d. Sosialisasi Massal Kode Etik Jaksa;
- e. Peningkatan Pengawasan Pelaksanaan Kode Etik Jaksa ;dan
- f. Evaluasi Berkala Pelaksanaan Kode Etik Jaksa

Dengan menjalankan kode etik jaksa secara efektif, Kejaksaan dapat memperoleh kepercayaan publik yang lebih tinggi, memberikan kontribusi pada penegakan hukum yang adil, dan memajukan sistem peradilan di Indonesia.

Saran

Setiap pelanggaran terhadap kode etik oleh jaksa harus ditindak secara transparan dan tegas, sehingga masyarakat melihat komitmen lembaga dalam menjaga integritas. Lembaga Kejaksaan perlu menyelenggarakan pelatihan rutin mengenai penerapan kode etik bagi jaksa agar mereka memahami dan menginternalisasi nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.

Lembaga Kejaksaan dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memantau penerapan kode etik, misalnya melalui sistem pelaporan online yang memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh jaksa secara transparan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu serta mendoakan saya sehingga proses penulisan ini berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Barizqi, G.C. (2018, October 1). *Peran pengawasan komisi kejaksaan terhadap penegakan kode etik jaksa*. Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/42940>
- Diki Trianto. (2023, October 26). *Survei: Kepercayaan Publik terhadap Kejaksaan Lebih Tinggi dari Lembaga Hukum Lain*. Rmol.Id. <https://politik.rmol.id/read/2023/10/26/594831/survei-kepercayaan-publik-terhadap-kejaksaan-lebih-tinggi-dari-lembaga-hukum-lain>
- Fachri, F.K. (2022, November 21). *Jaksa Agung Sampaikan Pentingnya Media Sosial bagi Kejaksaan RI*. Hukumonline.Com. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jaksa-agung-sampaikan-pentingnya-media-sosial-bagi-kejaksaan-ri-lt637b6739cc8cf/>
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 24.
- Supirman Rahman & Nurul Qamar, *Etika Profesi Hukum*, Makassar, Refleksi, 2014
- Tardjono, H. (2021). *URGENSI ETIKA PROFESI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN DI INDONESIA*. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(2), 51–64. <https://doi.org/10.32502/khdh.v2i2.3462>
- Theme SLR. (2020). *Official Website Persatuan Jaksa Indonesia*. Persatuan Jaksa Indonesia. <https://pji.kejaksaan.go.id/index.php/home/berita/1235>